

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan fokus pada asumsi bahwa agen akan berperilaku oportunistik apabila terjadi konflik dengan prinsipal. Teori keagenan telah banyak diaplikasikan dalam menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks pemerintahan. Konflik antara prinsipal dan agen dapat terjadi karena perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti dalam penyusunan anggaran atau pengambilan kebijakan. Asimetri informasi dapat timbul karena pihak agen mendapatkan akses informasi yang lebih banyak dari pada pihak prinsipal. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak agen dengan cara memanfaatkan akses informasi yang lebih besar tersebut.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen akan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (prinsipal) terhadap pemerintah (agen). Untuk mengatasi hal itu, tindakan audit diperlukan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi pihak prinsipal terhadap kinerja dari pihak agen (Nyman, Nilsson, dan Rapp, 2005). Pelaporan kinerja secara periodik juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi (Hasniati, 2016).

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Hubungan teori agensi terhadap akuntabilitas adalah memberikan informasi dari pusat kepada daerah

yang mana data-data dana desa atau data alokasi dana desa bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, teori keagenan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam proses pengelolaan dana desa. Secara umum pada teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah, 2006). Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. gency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent. Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya, Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi.

2.1.2 Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Teori stewardship ini mengharapkan individu yang berada didalam perusahaan maupun suatu organisasi lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya, sehingga sudah sewajarnya instansi memberikan pelayanan yang baik dikarenakan sumber daya yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan operasional berasal dari masyarakat. Motivasi individu untuk melakukan

suatu tindakan pada suatu instansi maupun perusahaan digambarkan secara jelas dalam teori ini yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal. Penanaman nilai yang terkandung dalam teori ini akan memberikan dampak yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*account-tability*) yang berarti keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan. Menurut pandangan Dwiyanto, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga (Wempy, 2017:131). Lembaga Administrasi Negara RI memberikan pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam instansi pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (*agen*) kepada masyarakat (*prinsipal*) atas kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan *akuntabilitas* dilingkungan instansi pemerintahan, dapat diperhatikan prinsip-prinsip *akuntabilitas* sebagai berikut :

- 1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan pemanfaatan yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Hasniati, 2016).

Menurut Lestari (2017) terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah parameter kerja, tolak ukur objektif, dan tata cara yang terukur. Dari ketiga aspek tersebut berkaitan dengan pengukuran yaitu berkenaan dengan intensitas kompetensi pokok yang harus diperankan oleh masing-masing anggota/aparat/pegawai berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas, dan hubungan sosial. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintah harus objektif dan jelas. Lebih diperjelas oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada entitas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Wempy, 2017:133-134).

2.3 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.3.1 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki suatu individu dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam sebuah pekerjaan yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2007). Kompetensi meliputi gabungan antara pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan (Rudana, 2005). Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas (Mada *et al*, 2017). Kompetensi ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam mengelola dana desa, melihat banyaknya jumlah sumber daya yang akan dikelola. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas merupakan sumber daya manusia yang dapat menciptakan nilai-nilai koperatif dan juga memiliki nilai kompetitif, generatif, dan inovatif karena individu dapat memanfaatkan dan memaksimalkan daya kreatif dan imajinasi (Ndahar, 1992). Hal ini dimaksudkan bahwa manusia memiliki daya yang dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan yang akan mempengaruhi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan.

Peningkatan sumber daya manusia di desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Antara lain melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri (Dewi, 2016). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009).

Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Irawati dan Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri 2014). Aparat desa merupakan peran yang menjalankan suatu kedudukan yang mewakili dari

sekelompok yang berkaitan sistem sosial di lingkungannya. Seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik dalam mengelola dana desa (Mada et al., 2017). Kompetensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mencapai tujuan, pemecah masalah, kompetensi interaksi berkomunikasi, dan mudah bekerja sama secara tim. Untuk kompetensi sendiri terbagi dua yakni :

a. Kompetensi Individu

Kompetensi individu memiliki sebuah tujuan dalam kebutuhan untuk penentuan atau daya kompetensi seseorang guna mengetahui tingkat kinerja seseorang. Apabila ia melakukan suatu hal pekerjaan, apakah hasil yang dilakukan nantinya termasuk dalam katagori baik atau buruk. Pada setiap individu terdapat beberapa karakteristik kompetesni dasar, antara lain :

- 1) Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri (self confidence), kontrol diri (self control), ketabahan atau daya tahan(hardiness).
- 2) Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
- 3) Bawaan (self concept) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai (value) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu.
- 4) Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu.
- 5) Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental (Moehariono, 2014).

b. Kompetensi Jabatan

Kompetensi jabatan (job competency), mempunyai peran yang sangat penting dan harus mendapat perhatian serius dari pihak manajemen karena aspek kompetensi jabatan ini sudah banyak digunakan sebagai dasar penentu posisi jabatan calon

karyawan atau calon pejabat yang akan menduduki suatu jabatan. Berdasarkan standar kompetensi pada kompetensi jabatan, tercakup dua komponen yang mendasar, yaitu kompetensi utama dan kompetensi pendukung, rinciannya adalah sebagai berikut:11

1. Kompetensi utama, merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu, agar pelaksanaan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka harus meliputi berikut ini:

- a. Akuntabilitas
- b. Organisasi pembelajar
- c. Menentukan masalah dan memecahkannya
- d. Manajemen perubahan
- e. Perencanaan stratejik
- f. Manajemen kebijakan
- g. Manajemen kinerja (management for result)
- h. Manajemen kualitas pelayanan
- i. Manajemen kerjasama

2. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk membantu atau mendukung terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu, yang terdiri atas:

- a. Komunikasi
- b. Teknologi informasi (Moeheriono, 2014).

2.3.2 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi adalah merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang menjadi hal penting dikarenakan organisasi membutuhkan aparatur yang memiliki komitmen organisasi, aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi stabil dan produktif dalam suatu kegiatan yang menguntungkan bagi organisasi (Greenberg dan Baron, 1993). Komitmen organisasi menurut Gibson (1996), merupakan keterlibatan rasa dan loyalitas yang ditampakkan oleh individu dalam melakukan kegiatan dalam suatu organisasinya atau unit organisasi. Konsep komitmen organisasi terdiri dari kepercayaan, menerima nilai organisasi, rela berusaha mencapai tujuan organisasi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas.

Cavoukian *et al* (2010) dalam Mada *et al* (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya manusia oleh organisasi, perlu memperhatikan komitmen karyawannya. Komitmen karyawan yang tinggi akan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Organisasi akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan sasaran jika para karyawan mempunyai komitmen terhadap organisasi.

Komitmen organisasi mempengaruhi apakah seorang pegawai akan tetap bertahan sebagai anggota organisasi atau meninggalkan organisasi untuk mencari pekerjaan lain. Keluarnya seorang pegawai dari suatu organisasi dapat dilakukan secara sukarela atau dikeluarkan secara paksa oleh organisasi. Seorang pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang kuat maka dia akan bertahan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi menggambarkan bahwa individu bekerja sesuai dengan tujuan organisasi yang dikarenakan individu tersebut merasa bahwa ia juga bagian dari organisasi.

2.3.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga. Partisipasi merupakan alat agar masyarakat terlibat secara efektif dalam proses kegiatan dan juga dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses kegiatan akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi (Handayani, 2006). Partisipasi merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi (Ach. Wazir Ws., et al., 1999) lemahnya partisipasi akan berdampak pada pengelolaan dana desa (Anwar dan Jatmiko, 2012). Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dalam bentuk ide-ide ataupun pelaporan kesalahan dalam laporan yang di muat oleh pemerintah tersebut.

Partisipasi menurut Conyers *dalam* Karika (2012) adalah alat yang berguna untuk memperoleh akses informasi, sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat, pemberian usul serta representatif kehadiran karena tanpa kehadiran masyarakat, maka pengembangan pembangunan akan gagal. Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yakni sebagai berikut :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Partisipasi masyarakat merupakan interaksi yang terjadi didalam suatu kelompok yang membentuk sebuah sistem yang didalamnya membahas segala hal yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

Partisipasi dapat juga dikatakan sebagai interaksi yang dialami individu dengan individu yang lain. Partisipasi masyarakat dibagi kedalam 6 (enam) pengertian (Mikkelsen, 1999):

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staff yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

2.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson,1993). Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat

(Perdana, 2018). Menurut Haag dan Keen (1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public service), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain (Murhada dan Yo Ceng Giap, 2011). Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa Negara maju.

Menurut Trisaputra (2013) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya, dalam pemanfaatan teknologi informasi mencakup sebagai berikut :

- a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut pada tabel 2.1 .

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil |
|------------|--|--|--|---|
| 1. | Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen | Variabel Bebas: Kompetensi Aparat Dana Desa, Komitmen Organisasi | Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|---|---|
| | | Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo | Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | dari Kompetensi Aparat Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 2. | Mustazir Ramli (2017) | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Variabel Bebas: Pengelolaan Keuangan Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Hasil Penelitian, pertama mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Kapasitas Pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sangat bagus. |
| 3. | Khaeril Wahyu Perdana (2018) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana | Variabel Bebas: Kompetensi Aparat Pengelola Dana | Hasil Penelitian, Pertama, terdapat dua variabel yang diterima |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| | | Desa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul | Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | dari hasil pengujian yang dilakukan, variabel tersebut adalah partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terdapat 2 variabel yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel tersebut adalah kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi. |
| 4 | Yasmin Nurdin dan Irwan Wijaya (2019) | Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana | Variabel Bebas: Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana | Hasil penelitian yang didapatkan kompetensi akuntansi aparat pengelola desa |

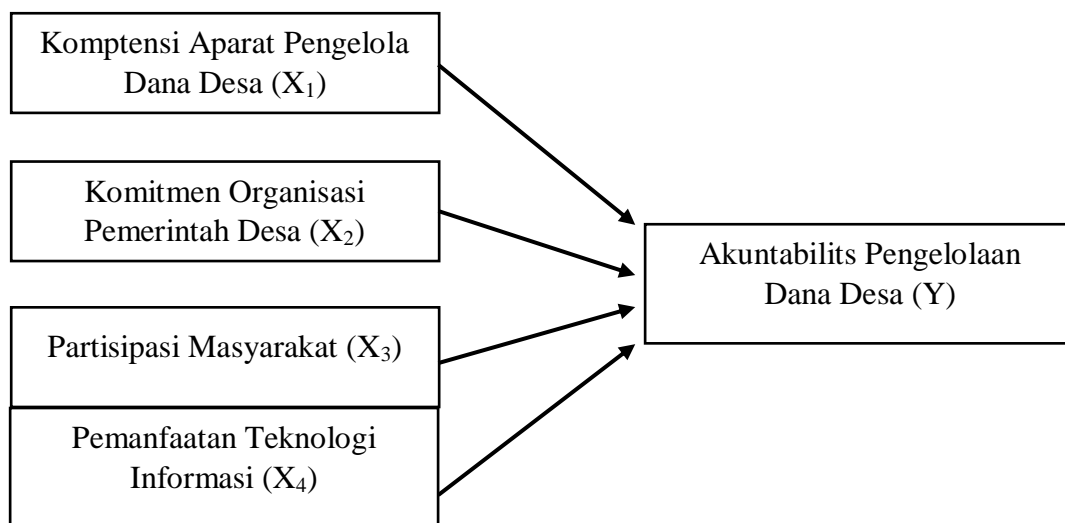
| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| | | Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan semakin baik dalam pengelolaan dana desa. |
| 5 | Siti Umaira dan Adnan (2019) | Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya) | Variabel Bebas : Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan Varibael terikat : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. |

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian. Dapat diketahui variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah

desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel terikatnya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuannya dilakukan penelitiannya ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Utara.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek. Aspek atau faktor yang akan mempengaruhi kompetensi dari aparatur dapat berupa pengetahuan (*skill*) baik *softskill* maupun *hardskill*, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu (Edison *et al.*, 2016). Aparatur pengelola dana desa secara otomatis memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dari segala kegiatan yang dilakukannya dalam mengelola dana desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan diistilahkan dengan akuntabilitas, dimana akuntabilitas ini merupakan suatu kewajiban bagi individu yang mengelola sumber daya yang diberikan untuk

memberikan pelayanan yang baik. Sumber daya yang dikelola oleh aparat sebagai pelayan harus ada pertanggungjawaban dan diperjelas sumber daya tersebut dikelola seperti apa dan bagaimana sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai tuan (principal) berhak untuk mengetahui informasi secara akuntabel dan transparan guna perbaikan pelayanan yang seharusnya untuk mewujudkan pelayanan organisasi yang baik. Mada *et al* (2017) mengatakan kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Perumusan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Konsep komitmen organisasi terdiri dari kepercayaan, menerima nilai organisasi, rela berusaha mencapai tujuan organisasi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Cavoukian *et al* (2010) dalam Mada *et al* (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh para principal (masyarakat). Anggaran tersebut dikelola oleh aparatur sebagai agen berdasarkan keinginan atau harapan dari masyarakat, tujuan dari organisasi ialah melayani publik dengan sebaik mungkin. Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan menjunjung tinggi tujuan organisasi dikarenakan aparatur merasa menjadi bagian dari organisasi (Mada *et al.*, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, hal ini dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi. Kewajiban

sebuah organisasi atau institusi ialah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Mada *et al* (2017) menemukan keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan.

H₂ : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.6.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa yang berbentuk ide termasuk kategori cukup baik, hal ini dilihat dari keaktifan masyarakat dalam memberikan ide saat kegiatan Musrembang (Hasnawati, 2018). Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka dan didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran.

Faktor- faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, yakni faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa. Partisipasi ini dapat juga berupa pengawasan dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau institusi dalam mengelola atau menggunakan anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal secara otomatis harus memantau dan menilai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Riyanto, 2015). Zein (2011) dalam Mada *et al* menemukan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.6.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengelola data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan bagi aparat ataupun staff dalam mengelola dana desa (Perdana, 2018). Penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki tujuan dalam pengelolaan data menjadi sebuah informasi yang digunakan

pengambilan keputusan, dan teknologi informasi menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur (Trisaputra, 2013). Sebuah organisasi memiliki kegiatan untuk mengelola sumber daya yang diberikan, terutama dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pelaksanaan amanat guna memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Pengelolaan dana desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam pengelolaan dana desa, karena dalam mengelola data dapat memberikan informasi guna hal dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data. Hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Perdana, 2018).

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa